

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

Fadilah

NIM/19133023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO BANGUN
KECAMATAN KAPUR IX

Nama : Fadilah
Nim : 19133023
Program Studi : Akuntansi (D III)
Fakultas : Ekonomi

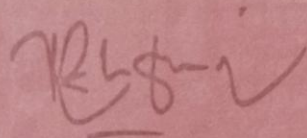
Padang, Oktober 2022

Disetujui Oleh,

Koordinator Program Studi Akuntansi D III

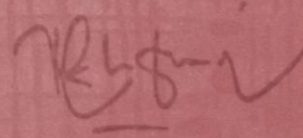
Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Halkadri Fitra SE., M.M., Ak.CA

NIP.19507181989031002



Halkadri Fitra SE., M.M., Ak.CA

NIP.19507181989031002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO BANGUN
KECAMATAN KAPUR IX

Nama : Fadilah
Nim : 19133023
Program Studi : Akuntansi (D III)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi
(DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

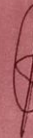
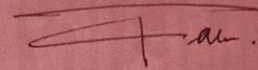
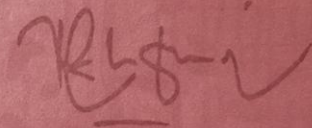
Padang, Oktober 2022

Tim Penguji,

Nama

Tanda Tangan

1. Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA (Ketua)
2. Fefri Indra Arza SE,M.Si,Ak (Anggota)
3. Salma Taqwa SE,M.Si (Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilah
Tahun Masuk/NIM : 2019/19133023
Tempat/Tgl Lahir : Bukit Tinggi/24 Maret 2001
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong 1 Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX
Judul Tugas Akhir : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau ditebrikan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2022



Fadilah

Nim 19133023

ABSTRAK

Fadilah : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX

Pembimbing : Halkadri Fitra SE,MM.Ak.CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Nagari, (2) Rasio Derajat Desentralisasi, (3) Rasio Efisiensi Keuangan Nagari, (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari (5) Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Koto Bangun yang beralamat di Jorong 1 Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kode Pos 26273.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun jika ditinjau dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Nagari dari Tahun 2019-2021 memiliki rata-rata sebesar 3,93% dengan kriteria rendah sekali dan pola hubungan instruktif, (2) Rasio Derajat Desentralisasi dari tahun 2019-2021 memiliki rata-rata sebesar 3,77% dengan kriteria sangat kurang. (3) Rasio Efisiensi Keuangan Nagari dari Tahun 2019-2021 memiliki rata-rata sebesar 100,55% dengan kriteria tidak efisien. (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari dari tahun 2019-2021 memiliki rata-rata sebesar 100% dengan kriteria efektivitas seimbang (5) Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari terdiri dari dua rasio yaitu rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2019-2021 memiliki rata-rata 19,28% dengan kriteria positif dan rasio pertumbuhan belanja tahun 2019-2021 memiliki rata-rata 16,64% dengan kriteria positif.

Kata Kunci: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Nagari, Rasio Efisiensi Keuangan Nagari, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX**” dengan baik serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih atsa segala bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan serta kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada orang tua, Ayahanda Kasridal, Ibunda Ermawati serta Adik penulis Melin dan Iklas serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moral juga materil dan selalu mendoakan penulis dalam meyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr.Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Halkadri Fitra SE,MM.Ak.CA selaku Koodinator Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Halkadri Fitra SE,MM.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Bapak Henri Agustin SE,M.Sc.Ak selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi dan program studi lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah berbagi ilmu dan membimbing peulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Wali, Staf, Kaur, Kasi, Operator dan Jorong Kantor Wali Nagari Koto Bangun yang telah membantu penulis dalam pengambilan data selama penelitian.
9. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada punulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, terimakasih atas semua support kalian. Semoga kita juga bisa sukses sesuai bidang kita masing-masing. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
10. Semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi Tahun Masuk 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan ini.

Akhir kalimat dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Padang, Oktober 2022

Fadilah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Defenisi Desa	12
B. Anggaran	13
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari	14
D. Laporan Keuangan Desa/Nagari	18
E. Otonomi Daerah	19
F. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Desa/Nagari)	20
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	28
A. Bentuk Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Rancangan Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Tahapan Penelitian	29
3. Objek Penelitian	29
4. Sumber Data	30
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Instansi	33

1. Sejarah Nagari Koto Bangun	33
2. Visi dan Misi Nagari Koto Bangun	35
3. Susunan atau Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Kantor Wali Nagari Koto Bangun	40
4. Tugas dan Fungsi Perangkat Kantor Wali Nagari Koto Bangun ...	43
5. Wilayah Nagari Koto Bangun	47
B. Pembahasan.....	48
1. Rasio Kemandirian Keuangan Nagari.....	48
2. Rasio Derajat Desentralisasi	51
3. Rasio Efisiensi Keuangan Nagari.....	53
4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari	55
5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari	56
BAB V PENUTUP.....	59
1. Kesimpulan	59
2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021	5
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Nagari	22
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi	24
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Keuangan Nagari	25
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari	26
Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari	27
Tabel 4.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Kantor Wali Nagari Koto Bangun	43
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Nagari	49
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi	51
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Nagari	53
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari	55
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Nagari	57
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Nagari	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Koto Bangun..42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun 2019
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun 2020
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban, dan wewenang serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kemampuan nagari dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan nagari menggunakan laporan yang telah dibuat oleh pemerintah salah satunya Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah nagari yang utama karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Adanya otonomi desa, maka pemerintah desa memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan. Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa masih dilakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) maka seringkali mengabaikan kinerja keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pemerintah desa dituntut untuk meratakan, menyeimbangkan serta melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai anggaran yang telah disusun. Untuk mampu melaksanakan roda pemerintahan pemerintah desa harus mengelola sumber dana pendapatan dan belanja desa dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan maupun belanja desa. Anggaran desa ini selalu berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk

setiap kegiatan atau aktivitas pemerintah desa. Dengan berbagai macam tuntutan masyarakat membuat pemerintah desa harus terbuka dan bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu rencana keuangan secara tahunan pemerintahan desa yang dibahas serta ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa dan Peraturan yang berlaku lainnya. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi masa satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu bentuk peraturan desa yang mencakup sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam jangka waktu satu tahun. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa seringkali menjadi permasalahan di desa yang dijadikan alat politik oleh pemerintah desa maupun pihak lainnya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan uang desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal. Pembiayaan Desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kapur IX adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, Indonesia. Kapur IX adalah salah satu dari tiga belas kecamatan yang ada di bagian timur Kabupaten Limapuluh Kota. Kapur IX berjarak ± 226 KM dari kota Padang, dan memakan waktu 5 sampai 6 jam perjalanan menggunakan kendaraan

umum. Nagari Koto Bangun merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintah Nagari, Pemerintah Nagari Koto Bangun telah menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan masyarakat, dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, dan Pelayanan. Nagari Koto Bangun terdiri atas tiga Jorong, yaitu *Jorong I*, *Jorong II*, dan *Jorong III*. Nagari Koto Bangun merupakan nagari yang memiliki potensi pendapatan yang cukup banyak mulai dari Pendapatan Asli Nagari, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2019	2.185.260.147	2.185.260.148	2.247.456.404	2.200.605.720
2020	2.089.581.050	2.089.581.050	2.136.431.735	2.134.400.819
2021	2.554.534.706	2.583.949.007	2.556.565.622	2.553.517.411

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah realisasi anggaran pendapatan dan belanja Nagari Koto Bangun pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan kemudian untuk tahun 2020 ke tahun 2021 kembali mengalami

peningkatan. Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan terjadinya fluktuasi pada realisasi pendapatan dan belanja Nagari Koto Bangun mulai dari tahun 2019 sampai 2021, tetapi keseluruhan data pada tabel tersebut belum mampu menjelaskan apakah realisasi dan anggaran pada pemerintahan tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Penilaian kinerja dinilai berdasarkan rasio, apakah sudah termasuk rasio yang dikategorikan sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang dan sangat kurang.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah salah satunya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah dilaksanakan. Rasio kinerja keuangan nagari memberikan gambaran kemampuan keuangan nagari dalam menjalankan dan membiayai pemerintahannya, dengan adanya rasio keuangan nagari dapat dilihat hubungan kemampuan keuangan nagari dengan tingkat kesejahteraan nagari(Halim,2008). Kinerja keuangan nagari adalah tingkat pencapaian suatu hasil kerja bidang keuangan pemerintah nagari yang meliputi penerimaan atau pendapatan dan belanja nagari selama satu periode anggaran. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan dengan cara menghitung analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan nagari dapat diukur dengan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Nagari, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi Keuangan Nagari, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari.

Rasio Kemandirian Keuangan Nagari menggambarkan suatu ketergantungan nagari terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan nagari maka semakin rendah ketergantungan nagari terhadap pihak eksternal yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Halim, 2012). Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli nagari dengan total penerimaan nagari, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli nagari maka semakin tinggi kemampuan pemerintah nagari dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima (Mahsun,2013). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai oleh pemerintah nagari dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang dimiliki nagari (Mardiasmo,2013). Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing pendapatan maupun belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan (Mahmudi, 2010).

Pada anggaran pendapatan dan belanja nagari anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi atau pemborosan dan

kebocoran sehingga memungkinkan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah desa masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan desa yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
2. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian besar masih dilakukan berdasarkan perimbangan anggaran tradisional (*incremental budget*) yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu. oleh karena itu sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Penilaian keberhasilan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur anggaran pendapatan dan belanja desa.

Maka dari itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis rasio keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa. Berdasarkan

permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun dengan judul penelitian **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021?
3. Bagaimana Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021?
4. Bagaimana Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021?
5. Bagaimana Analisis Rasio Pertumbuhan Keuangan Nagari Koto Bangun Tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah nagari koto bangun tahun 2019-2021.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui rasio derajat desentralisasi nagari koto bangun tahun 2019-2021.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui rasio efisiensi keuangan daerah nagari koto bangun tahun 2019-2021.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui rasio efektivitas pendapatan asli daerah nagari koto bangun tahun 2019-2021.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui rasio pertumbuhan keuangan nagari koto bangun tahun 2019-2021.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukannya penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori akuntansi yang telah di pelajari selama ini dalam aktivitas perusahaan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana analisis anggaran pendapatan dan belanja nagari yang dikelola instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.